POKOK-POKOK IMPLEMENTASI BERBAGAI KONSEP MANAJEMEN PEMBERDAYAAN, ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN MASA DEPAN BAGI ORGANISASI PUBLIK (SUPRA STRUKTUR POLITIK) DAN BAGI ORGANISASI SOSIAL LAINNYA (INFRA STRUKTUR POLITIK)

(Bagian II - Terakhir)

Oleh : Dr. H. Amin Ibrahim, MA*)

Kalau pada Bagian I telah dijelaskan upaya pemberdayaan organisasi publik (supra struktur politik) yang titik beratnya untuk meningkatkan profesionalisme, maka untuk infra struktur politik hendaknya lebih ditekankan pada kemampuan mediasi. Infra struktur politik yang baik mestinya menjadi mediator (penyambung lidah) rakyat yang diatasnamakannya. Jika sebagian diantaranya menjadi anggota supra struktur politik (terutama legislatif) sudah seharusnya derajat keterwakilannya terbukti dalam kiprahnya baik sebagai politisi yang negarawan sekaligus.

Dukungan Administrasi sebagai pendorong, perlu diberdayakan "sebagai darah" dari supra dan infra struktur politik.

1. Pendahuluan

Dari hasil penelitian terhadap infra struktur politik (Kota Bekasi 2001 – 2002) dan pengamatan sebelumnya, ternyata kondisinya termasuk kategori kurang baik. Urutannya dari tingkat yang terendah adalah Lembaga swadaya Masyarakat (LSM –LSM); partai-partai politik (parpol) dan organisasi-organisasi massa (ormas); organisasi profesi; organisasi-organisasi perempuan terutama dikaitkan dengan isu gender; dan akhirnya perlu pemolesan peningkatan peran dan partisipasi tokoh-tokoh informal.

Secara garis besar upaya-upaya tersebut, antara lain:

2. Upaya peningkatan Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM-LSM) di Kota Bekasi

Dari 117 daftar organisasi, yayasan dan LSM versi Pemda Kota Bekasi (Linmas, 2001) secara kategoris sebenarnya sukar dikategorikan mana yang LSM dan organisasi profesi. Kalau dilihat dari segi "didirikan oleh siapa" (masyarakat atau kelompok profesi), hampir seluruhnya bersifat LSM (baik yang lazim disebut disebut Ormas, Yayasan-yayasan maupun yang menamakan dirinya LSM) dan hanya mendekati sepersepuluhnya organisasi profesi.

* *Dosen STIA – LANRI Bandung Dosen Pascasarjana Unpad Bandung*

Secara kualitatif maupun legitimatif, menurut pengamatan, sebenarnya rata-rata LSM dan sebagian organisasi profesi yang ada, belum dapat dikatakan sebagai LSM atau organisasi profesi yang semestinya.

Pada dasarnya, baik yang menamakan dirinya LSM, yayasan, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, bahkan parpol, tergolong "perhimpunan sukarela", atau dalam kaidah ilmu politik, disebut infra struktur politik. Sebagai perhimpunan sukarela, sifatnya merupakan bentuk kerjasama yang bersifat formal ditentukan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)nya, mempunyai tujuan tertentu, keanggotaannya sukarela, bersifat otonomi (mandiri), biasanya tidak dibentuk oleh pemerintah (bersifat swasta), berfungsi sebagai perantara/ penyalur aspirasi antara warga negara dan supra struktur politik, dan disahkan menurut ketentuan yang berlaku agar ia dapat melakukan kegiatannya secara legal. (Secara keilmuan, pengesahan oleh pemerintah tidak diperlukan, tapi dalam sistem kenegaraan Indonesia diharuskan).

Berdasarkan kategori tersebut di atas, ternyata dari 117 organisasi tergolong LSM tersebut baru sebagian disahkan. Mengenai kemandiriannya, peneliti (saya) berpendapat, masih belum memenuhi kategori tersebut (sebagian besar), karena banyak yang dibentuk berdasarkan rekayasa, justru oleh Pemerintah, rata-rata terlalu menggantungkan dirinya pada pihak lain (bantuan pemerintah, bantuan pihak tertentu, sehingga dapat dikategorikan belum memenuhi kriteria LSM yang sebenarnya). Istilah populernya ada LSM "plat merah", LSM "proposal", LSM yang dikendalikan dari luar, dan hanya sedikit yang memadai (lihat disertasi Mansour Fakih, 2000).

Gejala umum terlihat di daerah penelitian khususnya, dan pengamatan dalam berbagai kesempatan di berbagai daerah, kebanyakan kinerja LSM lebih bersifat "kelompok penekan" *(pressure groups)* untuk kepentingannya sendiri. Dengan berbagai cara, ingin mendapatkan bagian dari "kue pembangunan yang ada" (yang sudah demikian kecil), bukannya berupaya bagaimana mengambil bagian untuk berpartisipasi "meramu adonan kue pembangunan (daerah)" yang selayaknya bagi daerah, dan bersama-sama menyukseskannya. Ini berarti masih banyak upaya pemberdayaan yang harus dilakukan, agar LSM dalam arti yang luas itu dapat mengambil bagian dari upaya mewujudkan "masyarakat madani" yang dicita-citakan.

Sesuai dengan kondisi yang ada, untuk kepentingan penelitian ini, LSM yang luas itu dibedakan secara *gradual* (bukan kategoris), menjadi LSM (yayasan-yayasan,organisasi-organisasi yang menamakan dirinya LSM), Ormas/Parpol; Organisasi profesi; peran organisasi-organisasi perempuan; peran tokoh-tokoh informal. Walaupun yang terakhir tidak ada organisasinya, tapi cukup berperan dalam kerangka pembangunan daerah dalam masyarakat transisi seperti di kota Bekasi.

Secara sederhana upaya pemberdayaan LSM dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.
Contoh Upaya Pemberdayaan Peningkatan Peran LSM bagi Pembangunan Daerah (Kota Bekasi)

No	KONSEP DASAR	PRINSIP-PRINSIP	SASARAN
1	Penerapan Konsep Manajemen Kinerja	- Jelas tolok ukur kinerja yang akan dicapai - Langkah-langkah pencapaiannya	- Jelas sasaran kualitas yang akan dicapai - Tuntunan/arah bagi program kerja
2	Penerapan Pendekatan Sistem	Melatih berpikir holistik	Agar lebih mementingkan kepentingan masyarakat luas
3	Penerapan Manajemen SDM	Meningkatkan kualitas personil (terutama kepengurusan LSM)	Agar bentuk partisipasi/ pemikirannya bermutu
4	Penerapan Kepemimpinan dan Organisasi Pembelajaran *(learning organization)*	- Kepemimpinan yang demokratis - Unit-unit pembelajaran	- Pimpinan LSM yang berakar pada masyarakat (bukan rekayasa) - Jelas arah partisipasi dan program-program bagian-bagian/unit-unitnya
5	Prinsip *Benchmarking*	Merekayasa model-model partisipasi yang sesuai dengan kebutuhan (kerjasama yang bersifat simbiose mutualistis)	- Agar jelas partisipasinya bagi pembangunan - Agar dapat mandiri secara bertahap
6	Penerapan konsep *Gemba Kaizen*	- Menyelesaikan persoalan secara delegatif - Unit-unit yang berusaha meningkatkan kinerja terus menerus secara bertahap/tekun	- Meningkatkan rasa memiliki - Meningkatkan motivasi untuk meningkatkan kualitas/kinerja dalam bentuk unit/kerjasama, bukan perorangan
7	Penerapan Manajemen Informasi	Merekayasa sistem dan teknik informasi sesuai kebutuhan organisasi	Agar semua langkah yang akan dilakukan mempunyai dasar data/informasi yang jelas, sehingga terencana, obyektif, bertahap dan tidak emosional
8	Penerapan Manajemen Konflik/kontijensi	Penilaian dan pemanfaatan kondisi secara sehat	Dapat menilai keadaan secara baik, mengelola konflik menjadi positif, dan menentukan prioritas kerjasama sesuai kondisi yang dihadapi
9	Penerapan MMB	Keberagaman, adalah kenyatan dan hikmah	Agar terjadi saling menghargai, meningkatkan kesatuan dan persatuan dalam keragaman

(Sumber : diolah dari Studi Kepustakaan dan hasil Penelitian :2001)

Dari tabel di atas esensi pemberdayaan LSM adalah mewujudkan LSM yang demokratis, berakar pada masyarakat, mandiri dan berprinsip apa yang dapat dibantu bagi orang lain/pembangunan, bukan sebaliknya. Perlu dipilih secara demokratis pengurus-pengurus yang berdedikasi, ulet, mengakar dan melihat jauh ke depan. Untuk secara bertahap dapat mandiri, terutama dari segi pendanaan/sarana prasarana, dapat dirancang model-model kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak dengan program-program yang realistis, tidak perlu muluk-muluk. Sebagai contoh misalnya kerjasama antara LSM (Pesantren Al Ittifaq di Ciwidey Jawa Barat dengan pihak Departemen Kehutanan - Pertanian – Swalayan – para partisipan cendekiawan, dalam mengembangkan agrobisnis terpadu dengan penerapan "*Gemba Kaizen*".

Model-model kerjasama lainnya yang tergolong dalam kategori *Participatory Rural Appraisal* (PRA) seperti yang disarankan PKSL – IPB (1998) untuk *Agroforestry* dan rehabilitasi ladang di Jawa Barat dapat di"*bench marking*" untuk keperluan lain, misalnya oleh LSM yang bergelut di bidang transportasi; pondok pesantren dan lainnya dengan kerangka model sebagai berikut : (misalnya kerjasama dengan Pemda atau BUMD).

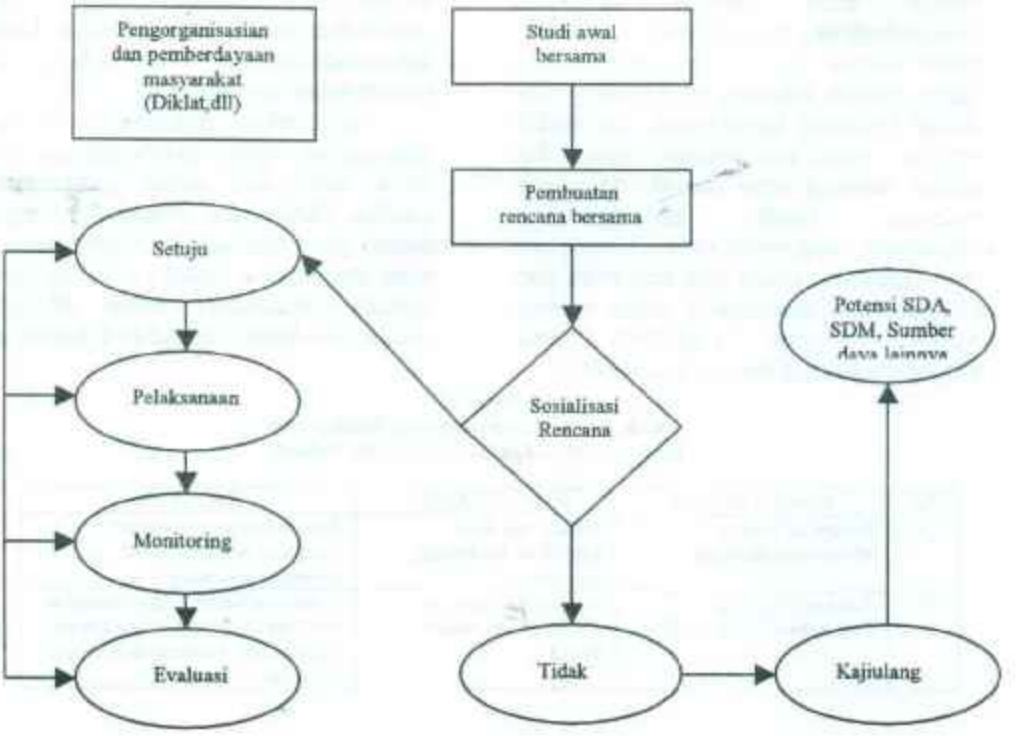

Dapat juga menerapkan pilihan model-model *Participating Research Appraisal* dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dirancang bersama para pakar dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat itu sendiri. (Lebih luas : Adimihardja & Hikmat, 2001).

Model lain seperti model "Ashram" Gedong Bagoes Oka yang sebenarnya juga dikerjakan banyak pesantren yang sukses dapat dijadikan pilihan (Soemartama, 2000).

3. peningkatan kualitas Ormas dan Parpol

Kesan umum terhadap Ormas dan Parpol ialah bersifat oportunis, mementingkan golongan, kurang mandiri, penuh slogan dengan mengatasnamakan rakyat, banyak rekayasa yang kurang sehat dalam berbagai kegiatannya. Ini adalah warisan masa lalu dimana ormas dan parpol memang lebih banyak merupakan rekayasa untuk melanggengkan kekuasaan, yang masih tersisa hingga saat ini. Akibatnya antara lain tercermin dari kualitas wakil-wakilnya di supra struktur politik (terutama Legislatif) yang kinerjanya kurang memuaskan berbagai pihak, terutama yang diatasnamakan (masyarakat). Hal ini bermakna menuntut sejumlah konsep pemberdayaan yang mendasar agar kualitas Ormas/Parpol meningkat dari waktu ke waktu. Dalam kenyataan pahit yang menjadi "trade mark" Ormas dan Parpol hingga saat ini ialah sangat antusias dan menghalalkan berbagai cara pada waktu Musyawarah Nasional (Munas) dan Musyawarah Daerah (Musda) dan kadang-kadang merekayasa Musyawarah Nasional Luar biasa (Munaslub) dan Musdalub untuk duduk dalam kepengurusan, tapi sesudah itu relatif tidak banyak berbuat, bahkan sering mengatasnamakan Ormas dan Parpol untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Program kerja yang dirumuskan penuh antusias dalam Munas dan Musda tersebut "terbaring begitu saja, hampir tidak tersentuh lagi".

Berdasarkan pengamatan di atas, serangkaian upaya pemberdayaan yang layak dikerjakan untuk meningkatkan kualitas Ormas dan Parpol (terutama di daerah penelitian ada 42 Parpol dengan 3 besar dan sisanya relatif kecil dan Ormas belasan jumlahnya) dapat dilukiskan secara garis besar pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.
Contoh : Konsep Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Ormas dan Parpol (di Kota Bekasi)

No	KONSEP DASAR	PRINSIP-PRINSIP	SASARAN
1	Penerapan konsep Manajemen Stratejik	Setting visi, misi, kebijakan dan strategi organisasi	Pengembangan wawa-san (terutama pengurus dalam berbagai tingkatan)
2	Penerapan konsep Manajemen SDM (MSDM)	Peningkatan kualitas SDM sebagai modal utama	Sistem rekrutmen yang bertingkat, bertahap, berlanjut, untuk kepen-tingan kader-kader pada berbagai tingkatan

2	Penerapan konsep Manajemen SDM (MSDM)	Peningkatan kualitas SDM sebagai modal utama	Sistem rekrutmen yang bertingkat, bertahap, berlanjut, untuk kepen-tingan kader-kader pada berbagai tingkatan
3	Penerapan konsep pendekatan Kesisteman	Pembudayaan berpikir holistik	Melatih berpikir keber-samaan, mengutamakan kepentingan umum di-atas kepentingan golo-ngan/pribadi
4	Penerapan konsep Manajemen Kinerja	- Tolok ukur yang jelas tentang kinerja yang ingin dicapai - Tolok ukur kinerja kader	- Program kerja yang realistis - Pemilihan secara obyektif kader-kader yang berkualitas
5	Konsep kepemimpinan/ organisasi (masa depan)	- Kepemimpinan kolektif , yang demokratis - Organisasi fungsional yang jelas bidang tugasnya	- Terpilih pimpinan secara demokratis - Agar kipralnya bagi kepentingan masya-rakat, jelas manfaatnya
6	Konsep manajemen *Gemba Kaizen*/ Organisasi Pembelajaran	- Setiap unit organisasi yang mampu meningkatkan kinerja - Inisiatif sesuai kondi-si daerah masing-masing secara nyata	- Meningkatkan kepe-dulian organisasi/ parpol - Meningkatkan derajat keterwakilan para kader sesuai tingkatannya.
7	Penerapan konsep "logistik wilayah"	Kemandirian dukungan administrasi dari anggota/ kader-kader sendiri	Kesadaran anggota/ pe-ngurus simpatisan/ de-natur akan prinsip kemandirian dukungan administrasi (dana, sarana, dll)
8	Penerapan konsep MMB	Memahami keragaman/ perbedaan pendapat, aspirasi dll	- Memanfaatkan setiap peluang kerjasama, belajar dari pihak lain (di litbang dengan baik) - Merumuskan aspirasi lebih realistis/meng-akar pada masyarakat - Memelihara persatu-an dalam keanekaan (demokratis)
9	Penerapan konsep *Benchmarking*	Belajar dari sukses ormas/ parpol yang *solid* dan mengakar pada konstituennya	Memanfaatkan setiap peluang kerjasama, belajar dari pihak lain (di litbang dengan baik)
10	Penerapan konsep manajemen informasi	Mewujudkan sistem informasi/ teknik informasi yang men-cakup seluruh jajaran organisasi	- Dasar penentuan strategi yang baik - Umpan balik yang bermanfaat - Mengenali kondisi dengan baik

(Sumber : *diolah dari Studi Kepustakaan dan hasil Penelitian* : 2001)

Esensi dari pemberdayaan Ormas dan Parpol ialah meningkatkan kualitas anggota dan kader-kadernya, sehingga mampu menyalurkan aspirasinya dengan baik, lebih mengakar di masyarakat, yang dengan sendirinya akan meningkatkan solidaritas dan kemandiriannya.

4. Upaya peningkatan kualitas organisasi profesi (di Kota Bekasi)

Upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas organisasi profesi di kota ini, sesuai visi – misi yang dicanangkan (2001 – 2005), hendaknya difokuskan pada organisasi-organisasi profesi di sektor ekonomi, terutama UKM dengan berbagai kegiatannya, sektor jasa dan perdagangan, dengan organisasi profesi pendukungnya yang selaras, kemudian organisasi profesi lainnya.

Secara garis besar konsep pemberdayaannya dapat dilukiskan dalam tabel berikut ini

Tabel 3.
Contoh : Konsep Pemberdayaan Organisasi Profesi (di Kota Bekasi)

No	KONSEP DASAR	PRINSIP-PRINSIP	SASARAN
1	Penerapan Konsep Manajemen Kinerja	Tolok ukur kinerja yang ditargetkan	Ada sasaran-sasaran yang jelas dan upaya mencapainya
2	Penerapan Konsep Pendekatan sistem	Melihat sesuatu secara holistik	- Menilai kelemahan, kelebihan, peluang, kendala secara baik - Kebersamaan meningkatkan profesi (kemitraan)
3	Penerapan konsep Manajemen Mutu Terpadu (MMT)	Penentuan kualitas produk barang/jasa yang baik	Menentukan bahan masukan-memproses dan hasil yang lebih baik dengan komitmen penuh untuk mencapainya
4	Penerapan konsep *Gemba Kaizen*	Peningkatan kualitas produk dengan diversifikasi usaha pada unit-unit bermutu	Bekerja sungguh-sungguh secara bersama meningkatkan mutu produk secara bertahap tapi pasti sehingga dapat dilakukan dengan biaya terjangkau

5	Penerapan konsep Organisasi pembelajaran/ *benchmarking*	Belajar bersama meningkat kan kualitas dengan memodifikasi produk-produk pihak lain dengan kerjasama dengan mereka	Meningkatkan kualitas produk dengan belajar dari orang lain dan memanfaat-kannya dengan baik/jujur (tidak dengan mencuri patent orang lain/*economic animal*)
6	Penerapan konsep Manajemen Multi Budaya (MMB)	Memahami keragaman itu adalah manfaat dan kecenderungan masa depan yang "makin beragam dalam aspi-rasi, keinginan, kegemaran, kualitas dan citra terhadap sesuatu	- Memanfaatkannya bagi peningkatan kualitas dengan beragam produk (peluang besar bagi usaha kerajinan yang potensial asalkan kualitasnya diperbaiki) - Menanamkan pada UKM misalnya prinsip "kecil itu indah" asal bermutu
7	Penerapan Manajemen Informasi	Menghimpun informasi sebaik mungkin baik dengan sistem/teknik yang modern (maupun sederhana bagi UKM)	- Agar dapat mengeta-hui keinginan pasar dalam berbagai seginya - Dapat menghimpun umpan balik dari pasar/ pelanggan guna perbaikan kualitas produk berikutnya

(Sumber : Diolah dari Studi Kepustakaan dan hasil Penelitian : 2001)

Dari tabel di atas terlihatlah dalam upaya meningkatkan kualitas organisasi profesi dengan fokus meningkatkan upaya ke arah ekonomi kerakyatan. Potensinya besar, tetapi perlu kesungguhan untuk belajar bersama meningkatkan kualitas produk/pelayanan, ada kemitraan dari usaha-usaha besar dan menghimpun informasi pasar sebaik mungkin. Masa depannya cerah, karena UKM pada dasarnya sumber kekuatan ekonomi rakyat, dan sesuai perkembangan masyarakat dunia yang makin beragam tuntutannya. "Kecil itu indah" (Schumacher, 1983), nampaknya makin realistis saat ini asalkan berkualitas baik. Potensi UKM banyak peluangnya pada usaha kerajinan, produk-produk lain yang beraneka ragam. Untuk UKM pada umumnya yang sangat dibutuhkan ialah bantuan modal dengan syarat lunak (misalnya bergulir), pemasaran, infra struktur sebagai akses pembukaan isolasi, pelatihan dan penguatan organisasi seperti yang sebenarnya telah tersirat dalm tabel di atas (lebih luas dalam : Sajogo dalam Sumodiningrat, 1997: 5 – 7).

5. **Upaya peningkatan peran organisasi-organisasi Perempuan (isu gender) (di Kota Bekasi)**

Hal ini menjadi penting karena secara kualitatif komposisi penduduk "perempuan" di Kota Bekasi sekitar 50 % (766.328 dari 1.556.176 tahun 1999, tahun 2000 penduduk 1.637.610, prosentase kaum perempuan diasumsikan relatif sama); tapi perannya masih perlu ditingkatkan. Isu gender mengisyaratkan kedudukan yang sama, peluang yang sama dalam pembangunan bagi kaum perempuan (tentunya dengan posisi-posisi yang sesuai, tapi tidak dibuat-buat penyesuaiannya).

Berdasarkan diskusi dengan para responden, banyak peluang yang dapat diperankan kaum perempuan diberbagai aspek pembangunan daerah. Upaya-upaya pemberdayaannya dapat dimanfaatkan pilihan-pilihan sebagai berikut :

Kaum/Organisasi Perempuan (di Kota Bekasi)

No	KONSEP DASAR	PRINSIP-PRINSIP	SASARAN
1	Kepemimpinan/ organisasi	- Peningkatan kualitas kepemimpinan - Pembenahan organisasi-organisasi dalam kegiatan yang jelas (spesifikasi)	Agar dapat meningkatkan peran dan daya tawarnya dalam pembangunan daerah
2	Penerapan konsep pendekatan Sistem	Melihat masalah-masalah dan peran perempuan seca-ra komprehensif integral	Agar dapat disusun skala prioritas peran secara bertahap
3	Penerapan konsep organisasi pembelajaran (*learning organization*)	*Regrouping* organisasi dalam unit-unit pembelajaran yang terprogram dengan baik	Agar organisasi-organisasi perempuan jelas diversifi-kasi/profesionalismenya untuk memenuhi isu gender (tidak hanya menuntut)
4	Penerapan konsep *Gemba Kaizen*	Pengembangan organisasi organisasi setempat dan pe-latihannya dalam kelompok kelompok karya yang jelas	Agar tersedia tenaga kerja perempuan yang berkua-litas dan beranekaragam
5	Penerapan konsep MMT	Kriteria mutu yang jelas terutama bagi organisasi organisasi perempuan yang berorientasi produk (ekonomi) dan jasa	Dapat dirancang kualitas/ upaya untuk menghasil-kan mutu produk/jasa yang baik (bahan baku-proses-tekad bersama un-tuk menghasilkan produk/ jasa yang bermutu)
6	Penerapan konsep MSDM	Menjadikan perempuan "modal pembangunan yang setara dengan laki-laki"	- Agar tersedia SDM yang proporsional - Memenuhi kriteria isu gender dan menghindari perbedaan penghargaan & pelecehan terhadap SDM perempuan

6	Penerapan konsep MSDM	Menjadikan perempuan "modal pembangunan yang setara dengan laki-laki"	- Agar tersedia SDM yang proporsional - Memenuhi kriteria isu gender dan menghindari perbedaan penghargaan & pelecehan terhadap SDM perempuan
7	Penerapan konsep *benchmarking*	Menjalin kerjasama dengan organisasi profesi dan orga-nisasi perempuan lain yang sukses, untuk peningkatan kualitas produk/jasa	Dapat lebih cepat meningkatkan profesionalisme beragam organisasi perempuan dengan spesifikasinya
8	Penerapan konsep Manajemen Multi Budaya	Memahami keragaman kaum perempuan	Agar terdapat upaya-upaya diversifikasi dan saling membutuhkan/ saling menghargai
9	Penerapan konsep Manajemen Informasi	Rekayasa sistem informasi tentang masalah-masalah/ data mengenai perempuan	- Agar dapat menyusun kebijakan-kebijakan organisasi berdasarkan data yang baik/ lengkap - Menampung umpan ba-lik untuk penyempur-naan organisasi selanjutnya

(Sumber : *Diolah dari Studi Kepustakaan dan hasil Penelitian* : 2001)

Dari tabel di atas terlihatlah bahwa untuk menjawab isu gender perlu diutamakan peningkatan kualitas organisasi-organisasi perempuan yang berorientasi profesionalisme, untuk menghasilkan produk dan jasa yang baik, sehingga *bargaining positionnya* meningkat. Diperlukan upaya-upaya peningkatan kualitas yang realistis sesuai tuntutan "pasar" (kebutuhan pembangunan daerah). Kemandirian organisasi-organisasi perempuan harus dirintis bertahap dan melepaskan diri dari ciri "ketergantungan yang tinggi" seperti selama ini.

6. Upaya peningkatan peran dan partisipasi tokoh-tokoh informal (tokoh masyarakat, cendekiawan/pakar, *mass media*, dan lainnya) dalam pembangunan daerah (Kota Bekasi)

Dalam masyarakat transisi seperti di Kota Bekasi, bersifat heterogen dan sedang dilanda berbagai kesulitan dalam melaksanakan pembangunan daerah (lebih-lebih Otda yang masih banyak kelemahannya), peranan dan partisipasi tokoh-tokoh informal, para pakar/cendekiawan, tokoh-tokoh pemuda, *mass media*, cukup strategis. Peran mereka untuk memberikan motivasi, pemikiran, menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan Kota Bekasi, cukup besar. Pemberdayaan bagi kelompok ini telah dibahas dalam pemberdayaan Mekanisme Kerja terdahulu. Terbukti dengan awalan perumusan visi – misi – kebijakan dan strategi pembangunan daerah 2001 – 2005 secara bersama telah merupakan awalan

yang baik dan perlu terus ditingkatkan terutama dengan model organisasi pembelajaran (*learning organization*) yang model-modelnya telah disinggung di muka. Peran kelompok ini untuk secara bertahap mencapai cita-cita reformasi yang menuju demokrasi yang terkonsolidasi (*consolidated democracy*), menjadi penting untuk menghadapi gehala-gejala anarki yang terkonsolidasi di pihak lain.

Kepada media massa di kota ini diharapkan perannya yang menyeimbangkan kepentingan pembangunan daerah dan bisnis media, bentuk lain dari mass media yang bertanggung jawab.

7. **Berbagai Konsep Pemberdayaan Dukungan Administrasi dalam rangka implementasi Administrasi Negara (Pembangunan) di Kota Bekasi**

a. Bagian akhir dari dimensi implementasi administrasi negara ialah Dukungan Administrasi. Secara garis besar prioritas pemberdayaannya terlihat sebagai berikut :

Tabel 5.
Contoh : Peringkat Kepentingan Pemberdayaan Dukungan Administrasi (di Kota Bekasi)

No	PERINGKAT UPAYA	DARI KONDISI	MENJADI
1	Peningkatan bantuan swasta dan luar negeri	Kurang baik (minimal) (44,73)	Cukup baik (minimal) (55,00 – 60,00)
2	Peningkatan bantuna TK I dan Pusat	Kurang baik (46,73)	Cukup baik (minimal) (55,00 – 60,00)
3	Kelengkapan data/manajemen informasi	Baik (minimal) (49,82)	Cukup baik (55,00 – 60,00)
4	Peningkatan tatalaksana/pelayanan dan sarana penunjangnya	Cukup baik (minimal) (53,09)	Cukup baik (60,00)
5	Peningkatan PAD dan keserasian APBD	Cukupbaik (minimal) (59,67)	Cukup baik (65,00)

(Sumber : *Diolah dari hasil Penelitian* : 2001)

Dari tabel di atas terlihatlah bahwa kondisi Dukungan Administrasi sebagai "darah" dari implementasi Administrasi Negara di Kota Bekasi pada kondisi "kurang darah", sehingga diperlukan upaya-upaya pemberdayaannya lebih lanjut sesuai skala prioritasnya.

b. Untuk meningkatkan bantuan swasta dan luar negeri terutama dalam bentuk investasi dan kerjasama, perlu dikembangkan prasyarat awal yakni suasana yang kondusif (jaminan keamanan ketertiban, kepastian hukum, tata laksana yang relatif mudah dan tidak berbelit-belit (*red tape*), tersedianya infra struktur, pemanfaatan SDM setempat yang perlu dipersiapkan/dilatih, serta tersedianya informasi yang lengkap) sebagai bahan perancangan kerjasama tersebut (investasi dalam berbagai bidang terutama jasa, perdagangan dan bahkan justru investasi di bidang manajemen informasi itu sendiri.

c. Untuk meningkatkan bantuan Tingkat I dan Pusat yang sekarang banyak dikeluhkan banyak daerah Tingkat II, karena dianggap kurang (misalnya dalam kasus Dana Alokasi Umum = DAU), barangkali rumusan bantuan Pusat sebagai berikut ini dapat dipertimbangkan :
   1) Daerah yang Laju Pertumbuhan Ekonominya (LPE) nya di atas Nasional/Tingkat I : mendapat bantuan 50% RAPBD
   2) LPE nya sama dengan Nasional : antara 50 – 70%
   3) LPE nya kurang dari Nasional mendapat bantuan di atas 70% RAPBD-nya, dapat dikaji kemungkinannya dengan mempertimbangkan krisis ekonomi yang sedang terjadi (Sarundajang, 2001: 260 – 261).

d. Kelengkapan data dan sistem informasi terpadu mutlak diperlukan, karena seluruh konsep pemberdayaan membutuhkan hal ini. Perlu segera dirancang Manajemen Informasi yang memenuhi kebutuhan semua pihak yang terkait, agar proses rancangan pembangunan sektor atau tingkat apapun juga dalam lingkungan Kota Bekasi mempunyai data/informasi yang jelas dan relatif lengkap/akurat.

Dalam penelitian inipun sangat dirasakan kesukaran mendapatkan data sekunder yang lengkap, sehingga terlalu mengandalkan tanggapan responden dan pengamatan di lapangan. Data yang tersebar disana sini, tidak tersusun dengan baik, berbeda untuk hal-hal yang sama (misalnya jumlah karyawan), menunjukkan betapa urgennya masalah manajemen informasi tersebut. Tidak tersedia bank data yang terpusat dan digelar dalam jaringan yang saling membantu, sehingga sulit menjamin objektivitas perencanaan yang dibuat. Lagipula sistem dan teknik informasi yang baik, akan dapat menghimpun umpan balik dan masukan-masukan dari masyarakat dan dapat diproses sesuai kebutuhan.

Karena suatu manajemen informasi yang canggih sangat mahal, perlu dirintis secara bertahap dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat menarik manfaat dari kerjasama tersebut dengan prinsip *simbiose mutualistik*. Disini penerapan prinsip *reinventing government* dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemikiran, didukung prinsip-prinsip lainnya seperti model organisasinya, target kinerja/kualitas produk pelayanannnya.

c. Untuk peningkatan kualitas (mestinya juga kuantitas) tata laksana dan pelayanan yang dirasakan masih kurang, baik sarana-prasarana dan produknya, perlu ditempuh upaya-upaya bersama dengan menerapkan prinsip *reinventing government*. Model-model Pelayanan Dibawah Satu Atap (PDSA) yang telah dirintis, misalnya untuk administrasi/pajak kendaraan bermotor, administrasi/pelayanan kependudukan (akte kelahiran, KTP dll), perlu dikembangkan lebih luas dan lebih baik. Kesan bahwa PDSA hanya memindahkan "ekonomi biaya tinggi" secara terpusat (karena banyaknya titipan-titipan berbagai instansi terkait, sehingga relatif tetap mahal) perlu dikaji ulang. Hendaknya model PDSA untuk berbagai kegiatan pelayanan/jasa publik harusnya lebih efektif dan efisien, walaupun setiap efisiensi dan efektifitas mesti ada harga/biaya (*cost*) yang wajar (apalagi PDSA tersebut bekerja sama dengan swasta atau dengan organisasi non profit sekalipun).

f. Untuk meningkatkan PAD, sesuatu yang sering dianggap "primadonanya Otonomi Daerah", perlu ditempuh cara-cara yang elegan, jangan justru membebani masyarakat dengan jalan pintas berupa pungutan-pungutan yang lebih membebani masyarakat.. Penyehatan BUMD menjadi penting, jangan sampai BUMD dianggap lembaga untuk kepentingan "kesejahteraan kelompok".

8. Rangkuman

Dari berbagai contoh di atas dari penelitian terhadap Kota Bekasi, dapat dirangkum sebagai berikut :

a. Dengan segala kelemahan yang ada, Pemerintah Daerah Kota Bekasi telah mencoba menangkap nuansa reformasi administrasi negara dengan memulai menerapkan prinsip manajemen stratejik dan pendekatan yang cukup komprehensif dalam perumusan visi – misi – kebijakan dan strategi Pembangunan Daerah Kota Bekasi, dengan Mekanisme Kerja yang melibatkan unsur-unsur *stake holders* pembangunan yang (relatif) mencakup berbagai pihak. Hasilnya ialah berupa cetak biru Program Pembangunan Daerah Kota Bekasi 2001 – 2005 (Perda Nomor 15 Tahun 2000) yang (relatif) cukup realistis.

b. Di kalangan responden sendiri (cerminan masyarakat Kota Bekasi) terdapat persepsi yang berbeda-beda tentang berbagai masalah pembangunan, termasuk kualitas peran antar golongan

dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya konsep-konsep pemberdayaan agar implementasi administrasi negara (pembangunan) di daerah dapat lebih maksimal untuk meningkatkan ketahanan wilayah sebagai fungsi dari Ketahanan Nasional.

c. Berbagai upaya pemberdayaan implementasi administrasi negara yang meliputi aspek-aspek Analisis Potensi Wilayah, Mekanisme Kerja, SDM dan Dukungan Administrasi, pada dasarnya dapat memanfaatkan secara selektif konsep-konsep beragam manajemen, tuntutan kepemimpinan dan organisasi masa depan yang dipilih dan diterapkan secara selektif sesuai kondisi daerah (Kota Bekasi).

d. Konsep pemberdayaan yang dianut hendaklah realistis, bersifat bertahap *(incremental)*, sesuai kondisi masyarakat Kota Bekasi dengan segala isinya yang bersifat "masyarakat transisi yang heterogenik".

DAFTAR PUSTAKA

Adimihardja, Kusnaka & Harry Hikmat, 2001. *Partisipatory Research Appraisal dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat*, Humaniora Utama Press – Bandung.

Fakih, Mansour, 2000. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosal, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sarundajang, 2001. *Pemerintahan Daerah di berbagai Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Schumacher, E.F, 1983. *Kecil itu Indah (Ilmu Ekonomi yang mementingkan rakyat kecil)(terjemahan)*, LP3ES, Jakarta.

Sumodiningrat, Gunawan, 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta.